

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS BERBASIS WEBSITE (E-SPPD) DI SUB BAGIAN PERJALANAN BIRO UMUM DAN PROTOKOL PROVINSI PAPUA

Jimmy Soter Reyaan<sup>1\*</sup>), Nur Aedah<sup>2)</sup>, Septinus Saa<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Biro Umum Dan Protokol Setda Provinsi Papua

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Email: [soterreyaan26@gmail.com](mailto:soterreyaan26@gmail.com)

## Abstract :

*The problem of how to implement the Electronic-based Business Travel Order Management Policy (E-SPPD) in the Travel Division of the General Bureau and Protocol of the Papua Province and what are the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Electronic-Based Business Travel Order Management Policy (E-SPPD) in the Travel Division of the General and Protocol Bureau of the Papua Province were developed as a result of this research. This study aims to explain and assess the Electronic-Based Service Travel Order Management Policy (E-SPPD) implementation process as well as the factors that support and hinder the implementation of the Electronic-Based Business Travel Order Management Policy. A study that describes the Implementation of Website-Based Business Travel Order Management Policy (E-SPPD) in the Travel Subdivision of the General Bureau and Protocol of Papua Province is an example of the descriptive qualitative research type. This kind of phenomenological research aims to paint a clear picture of the issues under investigation based on the informants' personal experiences. Network issues and system flaws, a lack of facilities and infrastructure, a lack of staff, manual disposition and application systems that can only be signed by the definitive Regional Secretary mean that work on the Official Travel Order (SPPD) will be done manually by Plh. Sekda if the Regional Secretary is not in the area. who signed it, despite the fact that its advantages can increase productivity by accelerating the creation of Website/Electronic Based Service Travel Orders (E-SPPD) and Factors the author met during interviews and field research.*

## Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas berbasis Elektronik (E-SPPD) di Subbagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi E-SPPD di Subbagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman informan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan E-SPPD masih menghadapi beberapa kekurangan dan kendala. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain masalah jaringan dan kesalahan sistem, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kekurangan staf, disposisi manual, dan sistem aplikasi yang hanya dapat ditandatangani oleh Sekda definitif. Hal ini menyebabkan jika Sekda tidak berada di daerah, proses pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan secara manual dengan Plh. Sekda yang menandatangani. Meskipun E-SPPD memiliki manfaat dalam meningkatkan efektivitas pekerjaan dengan mempermudah proses pembuatan SPPD berbasis website/elektronik (E-SPPD) dan faktor-faktor yang ditemui penulis selama proses wawancara dan observasi di lapangan.*

**Keyword:** *Implementation, Policy, Management, Website-Based Service Travel Order (E-SPPD), Sub-Section for General Bureau Travel and Protocol for Papua Province.*

## PENDAHULUAN

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah, sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh atasan kepada pegawai pemerintah atau karyawan instansi pemerintah untuk memberikan izin dan otorisasi dalam melakukan perjalanan dinas resmi. Dokumen ini berfungsi untuk mengatur dan mencatat perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau karyawan instansi pemerintah. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

digunakan pada pemerintahan agar perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan (Widiansa, 2020; Munawir, & Hajriyanti, 2021; Oktaviani, & Mulyani, 2016).

Tujuan utama dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pada perjalanan dinas. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, saat ini Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) biasanya

dikeluarkan dalam format/ bentuk digital, proses pengajuannya juga dilakukan melalui sistem atau platform elektronik (Lestari, dkk, 2018; Ilhadi & Arif, 2021). Hal ini mempermudah dalam pengelolaan dan pemantauan perjalanan dinas serta pengarsipan dokumen-dokumen terkait (Prasetyo, 2020). Dalam beberapa kasus, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dapat digunakan juga oleh perusahaan swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mengatur dan mencatat perjalanan dinas pegawainya (Rahmayanti, 2021; Rahmawati, dkk, 2018).

Pada Subbagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dilakukan dengan cara manual menggunakan Microsoft Word dan Excel dalam pengerjaan. Selanjutnya E-SPPD adalah singkatan dari "Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik". Ini mengacu pada implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memproses dan mengelola SPPD secara elektronik, menggantikan proses manual tradisional. Dengan E-SPPD, semua proses terkait perjalanan dinas, termasuk pengajuan, persetujuan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan, dilakukan melalui sistem elektronik. Ini mencakup penggunaan platform atau aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat, mengirim, menerima, dan melacak SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) secara digital.

E-SPPD memberikan beberapa keuntungan, seperti efisiensi administrasi, penghematan waktu dan sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perjalanan dinas (Pratiwi, 2021; Linarti, 2020). Di Sub bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol dan beberapa dinas terkait sendiri baru diperkenalkan tentang penggunaan dan penerapannya pada awal tahun 2022, sehingga pada saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur dan menjadi landasan penggunaan E- SPPD. Sehingga dalam penerapannya E-SPPD di Provinsi Papua masih mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah pusat yang dimana menjadi program untuk menyelenggarakan

pemerintahan berbasis elektronik (E-Governance).

Dalam penerapan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) di Sub Bagian Perjalanan mengandalkan komputer, jaringan, sumber daya manusia yang mencukupi dalam hal ini Staf Sub Bagian Perjalanan dan ketersediaan sarana dan prasarana menunjang, dalam pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) dimulai awalnya sama seperti pembuatan manual dengan menunggu Disposisi dari Sekda yang berjenjang kebawah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada kepada Kepala Biro, Kabag dan Kasubbag yang nantinya akan memerintahkan Staf untuk mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang termuat didalam Disposisi yang ada, setelah itu Staf menginput sesuai dengan perintah yang termuat didalam Disposisi ke Website *sppd.papua.go.id* dengan menginput nama petugas, tujuan kegiatan dan jumlah hari dan akan otomatis muncul format yang siap diteruskan kembali kepada Kasubbag, Kabag dan Kepala Biro untuk di verifikasi, setelah di verifikasi oleh Kepala Biro kemudian diteruskan kepada Sekda untuk di tandatangi secara elektronik. Berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah di tandatangi Sekda kemudian dikirim kembali kepada Sub Bagian Perjalanan untuk di cetak dan diproses seperti pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) manual.

Kendala yang dihadapi dalam proses ini antara lain, kurangnya kemampuan jaringan di ruang lingkup kantor sehingga menyebabkan website sering *maintance/error* dan keterbatasan tinta dan kertas yang cepat habis dikarenakan banyaknya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang masuk setiap hari selain itu juga dalam proses pengerjaannya kekurangan staf pada Sub Bagian Perjalanan menyebabkan Kepala Sub Bagian Perjalanan sering turun langsung dalam mengerjakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang menumpuk. Kemudian pada websitenya sendiri yang dapat menandatangani Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) hanya Sekda, sehingga apabila Sekda tidak berada di daerah, pengerjaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan secara manual dan di tandatangani oleh Plh (Pelaksana tugas harian) Sekda yaitu, Assisten 1, 2 dan 3 yang berada di dalam daerah. Dari tahapan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan E-SPPD yang masih baru ini dikerjakan secara daring (dalam jaringan), yang artinya masih bisa terkendala khususnya sistem error, tidak adanya jaringan, kemudian surat kegiatan yang sifatnya urgent/mendesak sehingga ketika melihat proses yang harus dilakukan dalam jaringan akan terhambat dibandingkan secara langsung karena dapat mengejar tanda tangan secara offline terhadap pejabat terkait, kemudian terkait faktor kedua pada subbagian perjalanan sudah mulai terbiasa dengan adanya pembuatan SPPD dengan berbasis elektronik, akan tetapi masih terkendala juga pada faktor yang ketiga dengan kurangnya infrastruktur yang memadai seperti tinta yang habis dan belum tersedia stoknya dan jumlah pegawai/staf yang sedikit dan kurang berkompeten menyebabkan pengerjaan E-SPPD ini berjalan terhambat dibandingkan dengan banyaknya jumlah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang harus dibuat setiap harinya.

Untuk itu dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website) di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua dengan kebijakan yang baru diterapkan ini beserta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Metode ini fokus pada pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis

dokumen, untuk memberikan gambaran rinci tentang implementasi kebijakan pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berbasis website (E-SPPD) dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan (Moleong, 2009). Dalam penelitian fenomenologi kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana individu mengalami dan memberikan makna terhadap fenomena tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menggali dan mendeskripsikan aspek-aspek penting dari pengalaman subjektif tersebut (Creswell, 2012).

Fokus penelitian memiliki manfaat dalam membatasi objek penelitian yang dipilih dan menghindari jumlah data yang terlalu banyak. Penentuan fokus penelitian difokuskan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi implementasi dan kebijakan ini. Fokus penelitian meliputi implementasi kebijakan pengelolaan E-SPPD di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan akan dilakukan di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, yang bertanggung jawab atas pembuatan surat tugas di lingkungan Setda Provinsi Papua.

Peneliti menggunakan sumber data primer, seperti wawancara, untuk memperoleh data empiris langsung dari informan. Data yang diinginkan mencakup informasi tentang mekanisme yang terkait dengan implementasi kebijakan E-SPPD dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua. Selain itu, peneliti juga

menggunakan data sekunder, seperti laporan atau dokumen tertulis, sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian.

Untuk memperoleh sumber informasi tambahan terkait dengan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam penggunaan SPPD. Dalam penelitian ini, terdapat 7 orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

Dalam analisis data, peneliti mengadopsi tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification), seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992).

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai cara untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu. Jenis triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu hasil dan pembahasan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan E-SPPD di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua belum memiliki dasar hukum/regulasi sendiri dan mengacu pada program Pemerintah Pusat dalam mewujudkan E-Governance. Meskipun kebijakan ini mempermudah proses pekerjaan, namun kekurangan pedoman sendiri menyebabkan sering terjadinya pelanggaran prosedur karena tidak adanya regulasi yang mengikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) Di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1974) yang dikutip dalam Agustino (2017:126), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. Tindakan-tindakan ini juga bertujuan untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George Edward III (1980) dalam Widodo (2010:96), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

#### **Komunikasi**

Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik terhadap setiap SKPD dengan mengadakan pelatihan dan pengenalan terkait sistem yang baru, namun dalam pelaksanaannya tentunya masih terdapat banyak kendala dalam proses penggunaannya, meskipun demikian dengan adanya kebijakan ini sangat membantu karena menjadi lebih transparan sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan.

#### **Sumberdaya**

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini Staf yang sedikit dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk, kemudian terkait sumber daya peralatan, ketersediaan jaringan kurang baik menyebabkan sering terjadinya error pada website mengakibatkan proses pengerjaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terhambat, tinta dan kertas yang cepat habis menjadi salah satu faktor penghambat pada pengerjaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), selanjutnya terkait sumber daya wewenang yang kurang seperti didalam Website hanya Sekda yang dapat melakukan TTE (Tanda Tangan Elektronik)

sehingga apabila Sekda diluar daerah, pengerjaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kembali dikerjakan dengan cara langsung.

### **Disposisi**

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa meskipun Kebijakan Surat Perintah Perjalanan Dinas telah berbasis Website, namun Disposisi masih dalam bentuk manual, sehingga proses pengerjaannya bergantung pada cepat atau lambatnya Disposisi itu dibuat oleh pimpinan berdasarkan surat kegiatan yang dilampirkan, apabila pimpinan sedang sibuk atau pimpinan dan mengajukan permohonan pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sehingga tidak dapat di proses karena itu menjadi dasar dalam pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua.

### **Struktur Birokrasi**

Dari pengumpulan data yang dilakukan, dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) terdapat tahapan-tahapan didalam proses pengerjaannya dimulai dari pengajuan surat kegiatan, dikeluarkan disposisi dan pembuatan SPPD melewati proses verifikasi dari beberapa pejabat berwenang diantaranya, kasubag perjalanan, kabag protokol, kepala biro, asisten 3 bidang umum dan yang terakhir sekda. Namun dalam pelaksanaannya karena terkait situasi atau urgent dilapangan, dalam proses pembuatannya langsung di kirim kepada sekda untuk di Tanda Tangan Elektronik tanpa melewati prosedur atau jenjang verifikasi yang ada. Hal ini dapat menunjukan kelemahan sistem yang ada dengan tidak adanya pembatasan dalam penggunaan Website E-SPPD, pengguna dapat langsung mengirimkan berkas langsung kepada Sekda tanpa melalui Kabag, Kepala Biro Umum dan Protokol.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

### **Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) Di Sub Bagian Perjalanan Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua**

Selama observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website ini adalah jaringan yang menyebabkan website sering error, sarana dan prasarana pendukung seperti tinta dan kertas yang kurang memadai, staf perjalanan yang sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan setiap harinya, disposisi yang menjadi dasar pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masih manual, pengaturan sistem yang berlaku hanya Sekda yang dapat menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Website sehingga ketika Sekda tidak berada dalam daerah pembuatannya kembali manual. Sedangkan faktor pendukung dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) ini adalah Pembuatan E-SPPD lebih efisien karena cukup dikerjakan melalui website dengan format yang sudah tersedia dan otomatis, pembuatan E-SPPD lebih cepat dibandingkan dengan yang manual, Pembuatan E-SPPD lebih efektif dan transparan sehingga dapat mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) yang ada pada Sub Bagian Perjalanan Provinsi Papua merupakan hal yang positif karena mempermudah proses sedang ada kegiatan, maka akan sulit bertemu sehingga efektif, transparan dan efisien, namun belum memiliki regulasi atau peraturan yang berlakung sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kendala-kendala dan menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan itu sendiri.

Faktor-faktor yang ditemui penulis dalam proses wawancara dan observasi

dilapangan menunjukkan lebih banyaknya faktor penghambat dibandingkan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) adalah sebagai berikut: Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) adalah; Jaringan yang merupakan sumber berjalannya sebuah website sering terjadi error, menyebabkan proses dari penginputan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lambat, Tinta dan kertas yang kurang memadai sehingga pada akhirnya nanti meskipun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah selesai, tidak bisa dicetak karena tidak ketersediaannya tinta dan kertas tersebut, Staf Perjalanan yang sedikit menyebabkan proses pengerjaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) menjadi lambat dikarenakan kurangnya Staf yang ada dengan banyaknya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikerjakan, Disposisi masih manual sehingga apabila pimpinan tidak ditempat, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak dapat dibuat dikarenakan tidak ada yang dapat memberikan Disposisi, Pengaturan sistem yang hanya dapat ditandatangani Sekda sehingga apabila Sekda berada di luar daerah, maka Plh (Pelaksana tugas harian) tidak bisa menandatangani lewat Website yang ada, untuk itu dibuat kembali dalam bentuk manual agar bisa di tandatangani oleh Plh (Pelaksana tugas harian) dan memakan waktu yang lama karena harus pergi menghadap Pimpinan terkait secara langsung, sedangkan faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) adalah; Pembuatan E-SPPD lebih efisien karena cukup dikerjakan melalui

website dengan format yang sudah tersedia dan otomatis tanpa perlu membawa surat langsung bertemu pimpinan dengan banyaknya SPPD masuk dan kurangnya pegawai/ Staf Perjalanan, Pembuatan E-SPPD lebih cepat dibandingkan dengan yang manual, Pembuatan E-SPPD lebih efektif dan transparan sehingga dapat mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan.

### Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah membuat regulasi di daerah terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website (E-SPPD) agar dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada terakomodir oleh peraturan dan dapat mencegah penyalahgunaan kebijakan tersebut, berdasarkan faktor-faktor penghambat yang ada penulis menyarankan; membuat jaringan khusus di Sub Bagian Perjalanan sehingga tidak terjadi error dalam proses penginputan kedalam *website*, memperbanyak kebutuhan tinta dan kertas ketika penyusunan anggaran belanja alat tulis kantor, melakukan *rolling* staf dari Sub Bagian lain yang terlalu banyak sehingga kebutuhan pegawai pada Sub Bagian Perjalanan dapat tercukupi, memasukan Disposisi kedalam bagian dari Website E-SPPD sehingga dalam proses pembuatannya semua transparan dan cepat, merubah pola sistem dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang hanya bisa di tandatangani oleh Sekda Definitif dapat di tandatangani juga oleh Plh (Pelaksana tugas harian) Sekda dalam hal ini Assisten 1,2 dan 3 sehingga tidak perlu lagi pengerjaan secara manual yang memerlukan proses yang lama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Cogressional Quarterly Inc. Husein, Muhammad Fakhri dan Amin Wibowo. (2006). *Sistem Informasi Manajemen Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

- Ilhadi, V., & Arif, R. (2021). Perancangan Dan Penerapan Sistem Informasi Dalam Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 5(2).
- Lestari, E. A. K., Anjarwani, S. E., & Agitha, N. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Berbasis Web. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine)*, 2(1).
- Linarti, P. A. (2020). *Pengembangan Sistem Informasi Penerbitan Surat Penanggung Jawabaaan Perjalanan Dinas Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Dengan Metode Fast* (Doctoral Dissertation, Isb Atma Luhur).
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Moleong, J. L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Munawir, M., & Hajriyanti, R. (2021). Model Sistem Informasi Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Web (Studi Kasus: Amik Indonesia). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 2(2), 63-68.
- Oktaviani, I., & Mulyani, A. (2016). Pengembangan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas. *Jurnal Algoritma*, 13(1), 58-62.
- Prasetyo, M. D. (2020). *LKP: Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Surat Perintah Tugas dan Perjalanan Dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Dinamika).
- Pratiwi, P. C. (2021). *PA: Pengelolaan Perjalanan Dinas Berbasis Aplikasi Google pada Unit Tata Usaha di UPT PB Padi dan Palawija Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Dinamika).
- Rachmawati, S., Retnasari, T., & Sunarto, S. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. *Jurnal Teknologi Dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, 1(2), 241-249.
- Rahmayanti, A. (2021). Pengembangan Purwarupa Sistem Informasi Manajemen Surat Perintah Perjalanan Dinas Dengan Metode User Centered Design (Studi Kasus: Fti Universitas Islam Indonesia).
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta:Bandung.
- Widiyansa, R. (2020). Perancangan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas pada PT G4S Cash Systems Berbasis Java Netbeans. *Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 1(02), 177-182.
- Widodo, J. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.